

Kabupaten Kepahiang

Sumber : Rakyat Bengkulu/Bengkulu Ekspres/Radar Bengkulu/Kompas/Media Indonesia

Tanggal : 09 / 04 / 2018

Empat Tsk Korupsi Jalan Provinsi Siap Disidang

Berkas Dilimpahkan

KEPAHIANG - Setelah menuntaskan berkas dakwaan terhadap 4 tersangka (tsk) dugaan korupsi jalan provinsi dengan paket Jalan Tebat Monok-Simpang Waim masing-masing, SB, FH, SY dan JA dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, Bengkulu. Dalam waktu dekat proses persidangan terhadap empat tsk tersebut akan segera digelar di Kota Bengkulu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepahiang, H. Lalu Syaifudin, SH, MH melalui Kasi Intel, Arya Marsepa, SH menjelaskan semua berkas dakwaan dan dokumen lain sudah dituntaskan. Berkas keempatnya sudah dilimpahkan ke pengadilan agar dapat disidang. "Tadi sudah dilimpahkan, mudah-mudahan sidangnya segera digelar guna mempertanggungjawabkan perbuatannya," kata Arya.

Keempat tsk dikenakan pasal 2 ayat (1) UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 3 UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU

RI No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 3 UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 9 UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dilansir sebelumnya, 4 tsk ini ditetapkan penyidik Satrikreskrim Polres Kepahiang karena dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan indikasi dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan proyek senilai Rp 4,3 miliar. Bahkan, berdasarkan audit perhitungan kerugian negara dari BPKP terdapat kerugian negara senilai Rp 1,6 miliar. Pada saat penyidikan, polisi langsung menahan empat tsk tersebut, kemudian setelah dilimpah ke jaksa, juga dilakukan penahanan.

Dalam indikasinya, pekerjaan yang dilaksanakan PT. Putra Batu Bandung Pratama tersebut diduga kuat terjadi kekurangan volume pekerjaan dan mark up. Namun kebenarannya akan dibuktikan saat proses persidangan. (zie)